

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitualisme (Jakarta, Konstitusi Press, 2006).

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009)

Asshiddiqie, Jimly, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010)

Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)

Badjeber, Zein. Buku Kedua Jilid 8A, Risalah Rapat PAH I MPR, (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001)

Fuady, Munir, Teori-Teori Besar dalam Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013)

Faiz, , Pan Mohamad. Perubahan Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemerintah dan Pemerintahan Daerah: Refleksi Pada Era Reformasi (Membaca Momentum 20 Tahun Reformasi Indonesia), (Bandar Lampung:CV. Anugerah Utama Raharja, 2018)

Harahap, M.Yahya, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan peninjauan Kembali Perkara Perdata, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008)

Hilman, Hadikusuma. Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung : Mandar Maju. 1995)

Harahap, M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Hanitijo, Soemitro Ronny. Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter. (Jakarta :
Ghalia Indonesia. 1990.)

Hanjani, Sofiana. 2014, Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun
2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang
Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito),
Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Indrati, Maria. F, Ilmu Perundang-undangan; Jenis Fungsi dan Materi Muatan.
(Yogyakarta: Kanisius. 2014)

Isnaini, Dina. Harmonisasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia, Tesis. (Surabaya: Program Magister Ilmu Hukum Universitas
Airlangga, 2010)

Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat Studi
Hukum, 2005)

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar). (Yogyakarta:
Liberty. 2006)

Nazir, Mohammad, Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1998)

Nazir, Mohammad, Metode Penelitian Edisi 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2003)

Ranggawidjaja, Rosjidi, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia,
(Bandung : Cv. Mandar Maju Cet I 1998)

Soebechi, Imam, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Lihat Cetak
Biru Pembaruan MA

Sirajudin, Farkhurrahman, dan Zurkarnain, Legislative Drafting.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Sukardi, Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah (Gentha Publishing, Jakarta, 2016)

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018)

Thohari, Eksistensi Ketetapan MPR Pasca UU No 12 Tahun 2011. Makalah dipresentasikan pada acara Pers Gathering Wartawan Parlemen tanggal 11-13 November di Pangkal Pinang.

Triwulan, Tutik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945, (Jakarta, Kencana, 2010)

Widjojanto, Bambang, Melanjutkan Pelembagaan Mahkamah Konstitusi (Usulan Perubahan Terhadap UU RI No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), (Jakarta: Democratic Reform Support Program (DRSP), 2008).

Jurnal

Finck Danielle, Judicial Review: The United States Supreme Court Versus the German Constitutional Court. Boston College International and Comparative Law Review volume 20, hlm. 139.

Fitri Meilany Langi, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam Perundang-Undangan di Indonesia, Lex Administratum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. Hlm.32

Angkouw Kevin, “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan”. Jurnal ex Administratum, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014. Hlm. 131.

MD Mahfud, Dalam Doni Silalahi. “Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang.”. Jurnal Untan, Vol. III No. (3). 2018. Hlm.17.

Cappelletti Mauro, Judicial Review in Comparative Perspective. California Law Review volume 58, hlm.1033-1034

Sudibyo Mooryati, MPR Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Kedudukan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan), JURNAL MAJELIS Vol. 1 No.1. Agustus 2009, hlm. 42.

Huda Ni'matul Huda, Berkayuh Diantara Bentuk Negara Kesatuan dan Federal, Jurnal Konstitusi PSHK UII, Vol.1.No.01. Hlm.35.

Wahyu Tri Hartomo. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Dan Putusan Nomor 56/Puu-Xiv/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.2 2018. Hlm. 122

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung .

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil.

Putusan MK Nomor 137/PUU-XII/2015.

Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.27.598 Tahun 2003.

Internet

<http://litbangdiklatkumdil.net/dok-kegiatan-litbang-kumdil/764-kewenangan-uji-materiil-peraturan-perundang-undangan-di-bawah-undang-undang.html>, diakses pada 11 Desember 2020

<http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol58/iss5/1>.

http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149:inde pendesi-dan-akuntabilitas-kekuasaan-kehakiman&catid=163&Itemid=619, diakses pada tanggal 20 November 2020, Pukul 22.00 WIB.

http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149:inde pendesi-dan-akuntabilitas-kekuasaan-

kehakiman&catid=163&Itemid=619, diakses pada tanggal 20 November 2020, Pukul 22.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agungdengan-mahkamah-konstitusi>, diakses pada tanggal 20 November 2020, pukul 23.00 WIB.

Cetak-Biru-Mahkamah-Agung-Bab-1-6.pdf, Halaman. 7, diakses pada tanggal 19 November 2020, pukul 18.00 WIB.